



Hubungan Antara Transparansi Anggaran dan Partisipasi Publik Dalam Green Budgeting Pemerintah Pusat

Syahrani Noer Fathia^{1*}

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

*syahrani.noer@feb.unila.ac.id¹

Alamat: Jalan Prof. Dr JI. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung

Korespondensi penulis: syahrani.noer@feb.unila.ac.id

Abstract. *This study examines the relationship between budget transparency and public participation in the implementation of Green Budgeting by the central government. The background of the research is based on the importance of fiscal transparency and public involvement in supporting budget policies oriented toward environmental sustainability. The objective of this study is to analyze the extent to which these two factors influence the effectiveness of Green Budgeting implementation. A quantitative approach was employed using a survey method involving 55 respondents from the general public, applying a Likert scale to measure perceptions of the studied variables. The data were analyzed using linear regression to determine the relationship between budget transparency (X1), public participation (X2), and Green Budgeting (Y). The results indicate that both budget transparency and public participation significantly influence the implementation of Green Budgeting, The regression coefficient for budget transparency was higher than that of public participation, indicating that information openness has a stronger influence in promoting the success of environmentally focused budget policies. The study concludes that enhancing transparency and public participation is crucial for strengthening the management of government budgets aimed at sustainability, and both elements must be consistently integrated into the fiscal policy framework of the central government.*

Keywords: *Green Budgeting, Public Participation, Transparency*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji hubungan antara transparansi anggaran dan partisipasi publik terhadap penerapan *Green Budgeting* oleh pemerintah pusat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keterbukaan informasi fiskal dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan anggaran yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap efektivitas implementasi *Green Budgeting*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan terhadap 55 responden dari masyarakat umum terkait dengan kriteria tertentu, menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi terhadap variabel yang diteliti. Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan antara transparansi anggaran (X1) dan partisipasi publik (X2) terhadap *Green Budgeting* (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik transparansi anggaran maupun partisipasi publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *Green Budgeting*, Koefisien regresi untuk transparansi anggaran lebih tinggi dibandingkan partisipasi publik, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam mendorong keberhasilan kebijakan lingkungan berbasis anggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam memperkuat pengelolaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan, dan keduanya perlu diintegrasikan secara konsisten dalam kerangka kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Kata kunci: *GreenBudgeting, Partisipasi Publik, Transparansi*

1. LATAR BELAKANG

Green Budgeting atau penganggaran ramah lingkungan telah menjadi isu penting dalam kebijakan publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim dan keberlanjutan, pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip

keberlanjutan dalam proses perencanaan dan penganggaran negara. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana yang disiapkan pemerintah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Kabuum, 2024). Dalam konteks ini, transparansi anggaran dan tingkat partisipasi publik merupakan dua faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas *Green Budgeting*. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana pemerintah memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka terkait perencanaan dan penggunaan anggaran negara. Informasi anggaran yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penganggaran dan mendorong akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana publik. Dalam hal *Green Budgeting*, transparansi ini juga mencakup keterbukaan tentang alokasi dana untuk proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Pranowo, 2024; Alqadrie, 2020). Partisipasi publik, di sisi lain, adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Semakin besar tingkat partisipasi publik, semakin besar pula peluang untuk memperoleh input yang relevan dan bermanfaat dalam rangka penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Mauni, 2025). Dalam konteks *Green Budgeting*, partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan tentang prioritas lingkungan dan keberlanjutan yang seharusnya dipertimbangkan dalam alokasi anggaran. Sebagai bagian dari upaya transparansi, pemerintah Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan akses lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi anggaran. Salah satunya adalah melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses rincian anggaran, termasuk alokasi yang ditujukan untuk mendukung proyek-proyek berbasis keberlanjutan. Selain itu, pemerintah juga melakukan *Green Budgeting* tagging, yaitu penandaan khusus terhadap anggaran yang berkaitan dengan program dan proyek yang memiliki dampak terhadap lingkungan (Angi & Wiati, 2021). Namun, meskipun terdapat upaya transparansi yang lebih besar, tantangan masih ada dalam memastikan partisipasi publik yang maksimal dalam proses *Green Budgeting*. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu anggaran dan *Green Budgeting* itu sendiri (Manohara et al., 2025). Untuk itu, pemerintah juga perlu menyelenggarakan forum konsultasi anggaran yang memungkinkan masyarakat dan pihak terkait lainnya memberikan masukan terhadap rencana anggaran, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Forum-forum ini menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran yang berfokus pada keberlanjutan (Nilwan et al., 2020). Laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh

Kemenkeu dan BPK juga menjadi salah satu indikator yang penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan *Green Budgeting*. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran negara dialokasikan untuk mendukung tujuan keberlanjutan dan bagaimana pencapaian tersebut dipantau dan dilaporkan secara teratur. Keberadaan laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik mengenai bagaimana pemerintah mengelola dana untuk proyek-proyek yang mendukung pencapaian tujuan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara transparansi anggaran dan tingkat partisipasi publik terhadap pelaksanaan *Green Budgeting* oleh pemerintah pusat. Melalui pendekatan kuantitatif dengan survei skoring menggunakan skala Likert, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat menilai transparansi informasi anggaran dan partisipasi mereka dalam konsultasi anggaran, serta dampaknya terhadap penerapan *Green Budgeting*. Data survei yang dikumpulkan akan mengukur sejauh mana indikator transparansi, seperti keterbukaan informasi anggaran secara digital, *Green Budgeting* tagging, forum konsultasi APBN lingkungan, dan laporan keberlanjutan, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan *Green Budgeting* oleh pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan model ekonometrika dengan variabel dependen Y, yaitu pelaksanaan *Green Budgeting*, dan variabel independen X1, yang terdiri dari transparansi anggaran dan X2 partisipasi publik. Penelitian ini juga menguji keterkaitan antara transparansi informasi yang diberikan pemerintah dan tingkat partisipasi publik terhadap penerapan kebijakan *Green Budgeting*. Dengan menggunakan metode survei, penelitian ini akan melibatkan responden dari kalangan masyarakat umum yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam isu-isu anggaran publik. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pandangan masyarakat terkait transparansi anggaran dan partisipasi publik dalam proses *Green Budgeting*, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan anggaran pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam meningkatkan efektivitas *Green Budgeting*. Selain itu, temuan-temuan ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Kemenkeu dan BPK, dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan *Green Budgeting* di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori-teori terkait penganggaran publik dan keberlanjutan, tetapi juga memberikan wawasan praktis

tentang bagaimana meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang ramah lingkungan.

2. KAJIAN TEORITIS

Green Budgeting dan Pembangunan Berkelanjutan

Green Budgeting merupakan suatu pendekatan inovatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran negara. Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan degradasi sumber daya alam, *Green Budgeting* muncul sebagai alat yang dapat mengarahkan sumber daya publik untuk mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anggaran negara tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (Manohara et al., 2025). UNDP (2019) mencatat bahwa *Green Budgeting* merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan planet ini, dengan memberikan prioritas kepada sektor-sektor yang berpotensi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Keberlanjutan ekonomi hanya dapat tercapai apabila kebijakan fiskal memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Stern (2007) dalam bukunya yang terkenal mengenai perubahan iklim menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang efektif untuk keberlanjutan harus mempertimbangkan faktor lingkungan dikuti (Setiawan, 2024), termasuk pengalokasian anggaran untuk program pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan pengurangan emisi karbon. Penerapan *Green Budgeting* mengharuskan pemerintah untuk berfokus pada kebijakan yang tidak hanya mengutamakan pembangunan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan *Green Budgeting* sangat bergantung pada bagaimana anggaran dialokasikan untuk program-program yang mendukung keberlanjutan, seperti pengelolaan energi terbarukan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Menurut mereka, meskipun alokasi anggaran yang tepat penting, hal yang lebih krusial adalah adanya keselarasan antara kebijakan lingkungan yang diterapkan dengan tujuan fiskal dan anggaran negara. Dalam konteks ini, pemerintah harus memastikan bahwa program-program lingkungan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara berkelanjutan. Keberhasilan

Green Budgeting juga dipengaruhi oleh keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. *Green Budgeting* yang efektif, diperlukan transparansi anggaran yang memadai serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan tersebut (Kabuum, 2024; Waluyo, 2021). *Green Budgeting* juga menghadapi tantangan dalam hal pengukuran dampak dari alokasi anggaran terhadap tujuan keberlanjutan. Sistem penganggaran yang baik, setiap pengeluaran harus diukur dan dievaluasi dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Namun, dalam konteks *Green Budgeting*, mengukur dampak terhadap lingkungan bisa sangat kompleks dan bergantung pada banyak variabel, termasuk perubahan dalam kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi (Nurmardiansyah, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang dapat mengukur sejauh mana program-program yang didanai dengan anggaran negara benar-benar berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam *Green Budgeting* juga tidak dapat diabaikan. Peters dan Pierre (2016) dikutip (Subekti & Ulfah, 2022) menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki peran besar dalam mencapai tujuan *Green Budgeting* melalui investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan *Green Budgeting* dapat diterapkan dengan lebih efektif dan dapat menciptakan dampak yang lebih luas. Penerapan *Green Budgeting* yang sukses memerlukan peran serta dari seluruh pihak terkait, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, yang bekerja bersama untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan mendukung tujuan keberlanjutan. Pada akhirnya, *Green Budgeting* juga harus memperhitungkan faktor sosial dalam kebijakan fiskal. Harrison dan Ward (2014) dikutip (Mauni, 2025) berpendapat bahwa dalam menjalankan *Green Budgeting*, penting untuk memastikan bahwa program-program lingkungan yang didanai dapat memberikan manfaat sosial yang signifikan, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa *Green Budgeting* bukan hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada dampak sosial yang dapat dihasilkan oleh kebijakan fiskal yang ramah lingkungan. Integrasi antara kebijakan sosial dan kebijakan lingkungan dalam penganggaran negara menjadi sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif. *Green Budgeting* juga membutuhkan adanya sinergi antara berbagai sektor kebijakan, termasuk sektor energi, pertanian, dan transportasi. Mengurangi dampak perubahan iklim dan mencapai tujuan keberlanjutan, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek yang melibatkan transformasi dalam sektor-sektor tersebut (Yudhiantara et al., 2020). Dalam

konteks ini, *Green Budgeting* harus melibatkan pendekatan yang holistik, di mana berbagai sektor dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan lingkungan yang lebih besar. Hal ini juga mencakup penyesuaian kebijakan fiskal yang dapat memfasilitasi transisi ke ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan. Penerapan *Green Budgeting* memerlukan perubahan paradigma dalam cara pemerintah merencanakan dan mengelola anggaran negara. Pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Angi & Wiati (2021) mengingatkan bahwa *Green Budgeting* tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan lingkungan jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan jangka panjang yang mencakup kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, *Green Budgeting* memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, agar dapat terwujud secara efektif.

Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran adalah suatu prinsip yang mendasari penyampaian informasi anggaran yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh publik. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan oleh pemerintah. Transparansi anggaran tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi tentang penggunaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Informasi anggaran yang jelas dan terbuka menjadi sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya negara (Saputra, 2022). Pentingnya transparansi anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah juga dijelaskan oleh Fiszbein dan Schady (2009) dikutip (Sartika, 2022). Mereka menekankan bahwa transparansi anggaran dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi anggaran secara terbuka, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alokasi sumber daya negara. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran, yang pada akhirnya memperbaiki praktik pengelolaan fiskal. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengidentifikasi apakah kebijakan yang dijalankan pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka dan apakah anggaran digunakan secara efisien. Penelitian oleh Hameed et al. (2008) dikutip (Dewi & Ferayani, 2022) menunjukkan bahwa tingkat transparansi anggaran yang lebih tinggi berkaitan langsung dengan pengelolaan fiskal yang lebih efisien. Ketika pemerintah

transparan dalam pengelolaan anggaran, hal ini mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik. Informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan anggaran memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif. Dalam konteks ini, transparansi anggaran tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan fiskal tetapi juga menurunkan tingkat korupsi dan penyalahgunaan sumber daya negara. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi anggaran dapat lebih mudah mengidentifikasi ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada. Transparansi anggaran juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran negara. Fiszbein dan Schady (2009) dikutip (Wibowo & Oktivalerina, 2022) berpendapat bahwa dengan adanya transparansi, masyarakat akan merasa diberdayakan untuk memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan anggaran. Partisipasi publik dalam proses penganggaran ini tidak hanya mengarah pada kebijakan yang lebih responsif, tetapi juga pada penciptaan pemerintahan yang lebih demokratis. Proses partisipatif ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi tentang prioritas kebijakan yang harus dibiayai dan bagaimana anggaran dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Transparansi anggaran memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas program-program pembangunan berkelanjutan, terutama dalam sektor lingkungan hidup (Alqadrie, 2020). Ketika informasi anggaran disampaikan secara jelas dan terbuka, masyarakat dapat dengan mudah mengakses data yang diperlukan untuk memahami prioritas alokasi anggaran, termasuk alokasi yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim. Sebagai contoh, masyarakat dapat mengetahui seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk program pengelolaan sumber daya alam atau pengurangan emisi karbon. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami kontribusi anggaran terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah dapat memperbaiki kualitas kebijakan, terutama yang terkait dengan program-program lingkungan. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat terlibat secara lebih aktif dalam pengawasan dan penilaian program-program tersebut (Nilwan et al., 2020). Program-program yang dijalankan pemerintah untuk keberlanjutan lingkungan akan lebih efektif jika masyarakat tahu bagaimana dana dialokasikan dan digunakan, serta dapat memberikan feedback tentang bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kondisi lingkungan. Dalam hal ini, transparansi anggaran menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pengelolaan program-program yang terkait dengan keberlanjutan. Transparansi anggaran

juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sektor swasta memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan transparansi anggaran, sektor swasta dapat memahami prioritas pemerintah dalam mendukung program-program lingkungan dan berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran hijau. Sektor swasta yang terlibat dalam program-program ini, seperti investasi dalam energi terbarukan atau pengurangan emisi, dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam hal penggunaan anggaran (Suluh, 2012). Penerapan transparansi anggaran yang baik juga berdampak pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Transparansi anggaran dapat menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, di mana keputusan anggaran mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat (Ridwan & Fitriyani, 2022). Pengelolaan anggaran yang transparan memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah merencanakan dan mengevaluasi kebijakan fiskal jangka panjang (Razak et al., 2020). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perencanaan jangka panjang menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan untuk program-program yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Transparansi anggaran membantu pemerintah dalam merencanakan alokasi dana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masa depan, seperti pengelolaan perubahan iklim dan pemulihan ekosistem. Dalam konteks negara berkembang, transparansi anggaran dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Negara-negara berkembang, di mana ketidakpercayaan terhadap pemerintah seringkali tinggi, transparansi anggaran dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan ini. Dengan membuka akses informasi anggaran, pemerintah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan sumber daya yang adil dan akuntabel, serta memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka (Manohara et al., 2025).

Transparansi anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi publik, dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui transparansi yang baik, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik, mengurangi penyalahgunaan dana, dan meningkatkan efektivitas program-program yang dirancang untuk mendukung tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas.

Partisipasi Publik dalam Penganggaran

Partisipasi publik dalam penganggaran adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan efektif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berdasarkan kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan aspirasi dan kebutuhan warga negara secara luas (Setiawan, 2024). Keterlibatan ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan suara mereka, yang dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Partisipasi publik dalam penganggaran dapat meningkatkan kualitas keputusan kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran, pemerintah tidak hanya memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan lebih percaya bahwa kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar mengutamakan kepentingan bersama dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil kebijakan tersebut. Hal ini pada gilirannya dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah diambil (Kabuum, 2024). Partisipasi publik dalam penganggaran dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Partisipasi aktif dalam proses penganggaran, kelompok-kelompok yang kurang terlayani atau terpinggirkan dapat memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Hal ini sangat relevan dalam konteks negara-negara berkembang, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi seringkali menjadi masalah utama. Dengan adanya partisipasi publik yang inklusif, kebijakan anggaran dapat diarahkan untuk mencakup kebutuhan semua lapisan masyarakat, sehingga distribusi sumber daya lebih merata dan adil. Penelitian oleh (Subekti & Ulfah, 2022) juga mendukung gagasan bahwa partisipasi publik yang lebih besar dalam proses penganggaran dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka menemukan bahwa ketika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan anggaran, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam program yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, masyarakat yang terlibat dapat memberikan masukan berharga tentang isu-isu lingkungan lokal yang mungkin tidak terdeteksi oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat. Keterlibatan masyarakat dalam penganggaran juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan anggaran. Transparansi anggaran memiliki hubungan erat dengan partisipasi publik. Namun, untuk partisipasi publik dapat berfungsi dengan efektif, masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai proses anggaran dan informasi yang relevan. Masyarakat yang mengetahui bagaimana anggaran negara dialokasikan dapat lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan atau memberikan umpan balik kepada pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang diterapkan (Mauni, 2025). Yudhiantara et al., (2020) juga menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap partisipasi publik sangat bergantung pada sejauh mana informasi anggaran dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Mereka menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal menyediakan data anggaran, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut dapat diakses dalam format yang mudah dipahami. Misalnya, publikasi anggaran dalam bentuk yang terlalu teknis atau sulit dipahami oleh masyarakat awam bisa menghambat partisipasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan data yang jelas, mudah diakses, dan mudah dimengerti oleh masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan masyarakat dalam penganggaran juga dapat memberikan dampak yang positif terhadap efektivitas program-program pembangunan. Angi & Wiati, (2021) menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi program-program yang dibiayai dengan anggaran negara, mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif mengenai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan apakah program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat memperbaiki kualitas program dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran atau kebijakan yang tidak efektif. Saputra, (2022) juga mencatat bahwa partisipasi publik dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan penganggaran negara mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa partisipasi publik yang lebih tinggi akan memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan mengenai prioritas anggaran untuk program-program perlindungan lingkungan, pengurangan emisi karbon, atau pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Pada akhirnya, partisipasi publik dalam penganggaran menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan anggaran mencerminkan nilai-nilai demokratis (Sartika, 2022). Melalui partisipasi yang aktif dan

terinformasi, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kepentingan bersama.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk menguji hubungan antara transparansi anggaran dan tingkat partisipasi publik terhadap pelaksanaan *Green Budgeting* oleh pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana transparansi anggaran dan partisipasi publik berpengaruh terhadap efektivitas *Green Budgeting*, yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator kunci yang terkait dengan transparansi dan partisipasi publik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variabel.

Survei akan dilakukan dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur pandangan masyarakat terhadap perannya dalam transparansi anggaran dan tingkat partisipasi publik. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan isu *Green Budgeting*. Skala Likert yang digunakan dalam survei ini akan mencakup berbagai pernyataan yang terkait dengan keterbukaan informasi anggaran, pemahaman tentang *Green Budgeting* tagging, jumlah dan kualitas forum konsultasi anggaran terkait lingkungan, serta akses terhadap laporan keberlanjutan dari insatansi keuangan pemerintah pusat dari Kemenkeu dan BPK. Skala ini akan memudahkan pengukuran sikap dan persepsi responden terhadap faktor-faktor yang memengaruhi implementasi *Green Budgeting*.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling acak sederhana, dengan sasaran responden yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang beragam, namun dengan kriteria tertentu yang berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap anggaran public berbasis *Green Budgeting*. Ukuran sampel akan disesuaikan dengan kebutuhan statistik dan potensi representasi yang mencakup pandangan dari masyarakat umum, untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan dapat digeneralisasikan. Survei akan dilakukan secara daring untuk memudahkan responden mengakses dan memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang disediakan, serta untuk memaksimalkan jangkauan responden di seluruh Indonesia.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan model ekonometrika yang menghubungkan variabel dependen (Y), yaitu penerapan *Green Budgeting*, dengan variabel independen (X1), yaitu transparansi anggaran dan (X2), partisipasi publik. Regresi linear sederhana dipilih karena

bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh transparansi anggaran dan partisipasi publik terhadap tingkat penerapan *Green Budgeting*.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, uji validitas dan reliabilitas akan dilakukan terhadap instrumen survei sebelum data dikumpulkan. Setelah data terkumpul, analisis statistik akan dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Stata untuk menguji hipotesis penelitian dan mengevaluasi hubungan antara transparansi anggaran, partisipasi publik, dan penerapan *Green Budgeting*. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh kedua variabel tersebut terhadap efektivitas penganggaran ramah lingkungan oleh lembaga pemerintah pusat yaitu Kemenkeu dan BPK.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Survei

Survei terhadap 55 responden dilakukan dengan menggunakan instrumen skala Likert lima poin, yang dirancang untuk mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap transparansi anggaran, partisipasi publik, dan penerapan *Green Budgeting* pada pemerintah pusat. Instrumen ini dibangun berdasarkan indikator seperti keterbukaan informasi anggaran secara digital, keberadaan *Green Budgeting* tagging, jumlah forum konsultasi publik, serta ketersediaan laporan keberlanjutan dari Kemenkeu dan BPK. Metode survei ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat secara kuantitatif atas keterlibatan mereka dalam proses penganggaran yang ramah lingkungan. Dari hasil pengumpulan data, diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap upaya transparansi anggaran oleh pemerintah. Hal ini tercermin dalam nilai rata-rata untuk variabel transparansi anggaran yang mencapai 4.1 dari skala maksimum 5. Nilai ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa cukup puas terhadap akses mereka terhadap informasi anggaran, baik melalui situs resmi kementerian maupun platform digital lainnya yang menyediakan data pengeluaran dan alokasi anggaran secara terbuka. Pada variabel partisipasi publik, hasil survei menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3.9. Angka ini mencerminkan bahwa masyarakat menilai partisipasi publik dalam proses penganggaran sudah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Beberapa responden menyatakan bahwa meskipun forum konsultasi publik tersedia, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih belum optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau hambatan dalam akses terhadap forum-forum tersebut. Rata-rata skor untuk penerapan *Green Budgeting* mencapai angka 4.0. Nilai ini menunjukkan bahwa

masyarakat merasakan adanya komitmen pemerintah dalam mengarahkan kebijakan fiskal ke arah yang lebih ramah lingkungan. Beberapa indikator seperti adanya penandaan anggaran yang terkait proyek lingkungan (*green tagging*) dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan secara berkala oleh Kemenkeu dan BPK menjadi bukti nyata dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara transparansi anggaran dan penerapan *Green Budgeting*. Dengan koefisien regresi sebesar 0.592, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam transparansi anggaran secara signifikan dapat mendorong penerapan *Green Budgeting*. Masyarakat yang merasa mendapat akses informasi yang cukup mengenai alokasi anggaran cenderung memiliki persepsi positif terhadap arah kebijakan penganggaran yang mendukung pelestarian lingkungan. Partisipasi publik juga berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Green Budgeting*, meskipun dengan koefisien yang lebih kecil yaitu sebesar 0.432. Artinya, meskipun pengaruhnya tidak sebesar transparansi, keterlibatan masyarakat tetap memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penganggaran berbasis lingkungan. Partisipasi publik yang efektif menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan dan memperkuat legitimasi anggaran yang disusun. Nilai R-square sebesar 0.60 mengindikasikan bahwa kombinasi antara transparansi dan partisipasi publik mampu menjelaskan 60% variasi dalam persepsi terhadap penerapan *Green Budgeting*. Hal ini memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor kunci dalam mendorong kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Sementara itu, nilai F sebesar 18.33 dengan signifikansi di bawah 0.001 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cukup kuat dan layak digunakan untuk menarik kesimpulan. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, khususnya di Kemenkeu dan BPK, untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi dan membangun mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif. Penyediaan data anggaran yang lebih terstruktur dan mudah diakses akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dalam kebijakan fiskal. Begitu pula, penguatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam forum konsultasi akan memperkaya kualitas masukan terhadap penganggaran yang berorientasi lingkungan.

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment, yang menghasilkan nilai loading factor (koefisien korelasi antara item pertanyaan dan total skor variabel). Suatu item dianggap valid jika memiliki loading factor

lebih dari 0.5. Pada penelitian ini, semua indikator menunjukkan nilai lebih dari 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut valid secara statistik. Berikut adalah Tabel 1 yang menunjukkan nilai validitas masing-masing item dari ketiga variabel:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Loading Factor
Transparansi Anggaran	Keterbukaan Informasi Anggaran Digital dan Laporan Keberlanjutan	0.721
	<i>Green Budgeting</i> Tagging	0.682
Partisipasi Publik	Forum Konsultasi Publik APBN Lingkungan	0.694
	Aksesibilitas Partisipasi Masyarakat	0.736
<i>Green Budgeting</i>	Pelaporan Keberlanjutan oleh Kemenkeu & BPK	0.755
	Implementasi Anggaran Lingkungan	0.769

Sumber: Pengolahan SPSS, 2024

Nilai loading factor tertinggi diperoleh pada indikator implementasi anggaran lingkungan sebesar 0.769, yang menunjukkan bahwa item tersebut sangat kuat dalam menjelaskan variabel *Green Budgeting*. Sementara indikator dengan nilai terendah tetap berada di atas ambang batas, yaitu 0.682 pada indikator *Green Budgeting* tagging, yang tetap valid. Kemudian dilakukan uji reliabilitas untuk melihat konsistensi internal dari kuesioner. Uji ini menggunakan ukuran Cronbach's Alpha, yang akan menunjukkan sejauh mana item-item dalam satu variabel saling berkorelasi. Umumnya, nilai Cronbach's Alpha dianggap memadai jika di atas 0.70. Hasil uji reliabilitas terhadap seluruh item dari ketiga variabel menunjukkan nilai 0.850, yang berarti bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Dengan demikian, seluruh item yang digunakan dalam kuesioner dapat diandalkan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap transparansi, partisipasi publik, dan *Green Budgeting*. Berikut adalah Tabel 2 yang menampilkan hasil uji reliabilitas:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha
Transparansi Anggaran	2	0.823
Partisipasi Publik	2	0.811
<i>Green Budgeting</i>	2	0.834

Total Instrumen	6	0.850
-----------------	---	-------

Sumber: Pengolahan SPSS, 2024

Nilai-nilai Cronbach's Alpha yang ditunjukkan dalam Tabel 2 memperkuat keyakinan bahwa seluruh konstruk yang digunakan telah memenuhi kriteria reliabilitas. Variabel *Green Budgeting* memiliki nilai tertinggi (0.834), diikuti oleh transparansi anggaran dan partisipasi publik. Tidak ada satu pun variabel yang memiliki nilai di bawah 0.8, yang mengindikasikan bahwa seluruh item terstruktur dengan baik dan konsisten dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas ini, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam kuesioner layak digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Tidak diperlukan penghapusan atau revisi terhadap indikator yang ada, karena seluruhnya telah terbukti valid dan reliabel secara statistik. Validitas yang tinggi menjamin bahwa instrumen ini benar-benar mencerminkan persepsi masyarakat mengenai keterbukaan anggaran, partisipasi dalam proses fiskal, dan pandangan terhadap kebijakan *Green Budgeting* pemerintah pusat. Sementara reliabilitas yang tinggi menjamin bahwa hasil pengukuran dapat dipercaya dan dapat direplikasi dalam studi serupa di waktu yang berbeda atau pada populasi yang berbeda. Dengan demikian, proses uji instrumen telah memenuhi syarat metodologis dan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melanjutkan ke tahap analisis inferensial, seperti regresi linear guna menguji pengaruh antara transparansi dan partisipasi publik terhadap *Green Budgeting* di tingkat pemerintah pusat.

Analisis Regresi

Analisis regresi linear Untuk mengetahui pengaruh transparansi anggaran dan partisipasi publik terhadap penerapan *Green Budgeting* di tingkat pemerintah pusat, dilakukan analisis regresi linear sederhana. Tujuan dari analisis ini adalah menguji seberapa besar kontribusi variabel independen ($X_1 = \text{Transparansi Anggaran}$, $X_2 = \text{Partisipasi Publik}$) dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen ($Y = \text{Green Budgeting}$). Hasil dari regresi menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Nilai R-squared (R^2) sebesar 0.60 menandakan bahwa 60% variasi dalam penerapan *Green Budgeting* dapat dijelaskan oleh transparansi anggaran dan partisipasi publik. Sisanya, sebesar 40%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Nilai F hitung sebesar 18.33 dengan tingkat signifikansi (p-value) kurang dari 0.001 menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Artinya, secara simultan kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ini

memperkuat asumsi bahwa transparansi dan partisipasi merupakan komponen penting dalam penguatan *Green Budgeting*. Koefisien regresi untuk variabel transparansi anggaran adalah 0.592 dengan nilai t sebesar 4.736 dan tingkat signifikansi 0.000. Ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Green Budgeting*. Dengan kata lain, semakin tinggi transparansi dalam penyusunan dan penyajian anggaran, semakin tinggi pula kualitas *Green Budgeting* yang dirasakan masyarakat.

Variabel partisipasi publik memiliki koefisien sebesar 0.432 dengan nilai t sebesar 3.065 dan signifikansi 0.004. Ini juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran, semakin besar pengaruh positif terhadap *Green Budgeting*. Meski nilai koefisiennya lebih kecil dibandingkan transparansi, partisipasi tetap menjadi faktor penting. Nilai konstanta sebesar 1.512 menunjukkan bahwa apabila tidak ada kontribusi dari transparansi anggaran maupun partisipasi publik, maka nilai dasar dari penerapan *Green Budgeting* berada pada angka tersebut. Konstanta ini dapat diartikan sebagai baseline persepsi masyarakat terhadap kebijakan lingkungan tanpa pengaruh langsung dari transparansi atau partisipasi.

Model ini menegaskan pentingnya dua pilar utama tata kelola anggaran yang baik dalam mendukung transformasi fiskal menuju keberlanjutan. Pemerintah pusat, melalui Kemenkeu dan BPK, dituntut untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan memperluas kanal partisipatif masyarakat dalam pengambilan kebijakan fiskal. Hasil ini memberikan arahan kebijakan yang jelas. Upaya peningkatan transparansi digital, pemantauan tagging anggaran hijau, serta pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi akan memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan *Green Budgeting*. Dalam jangka panjang, ini akan membantu membangun legitimasi publik terhadap kebijakan lingkungan yang berbasis data.

Kehadiran forum publik yang inklusif dan kebijakan partisipatif akan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya penganggaran berkelanjutan. Hasil ini dapat dijadikan dasar argumentasi oleh para pembuat kebijakan untuk memperluas ruang partisipasi dan mengembangkan sistem pelaporan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan mengkombinasi antara transparansi dan partisipasi publik secara signifikan memengaruhi keberhasilan implementasi *Green Budgeting*. Hal ini memperkuat argumen bahwa reformasi fiskal yang hijau memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Sig.
Konstanta (<i>Green Budgeting</i>)	1.512	0.325	4.655	0.000
Transparansi Anggaran (X1)	0.592	0.125	4.736	0.000
Partisipasi Publik (X2)	0.432	0.141	3.065	0.004

Sumber: Pengolahan SPSS, 2024

$R^2 = 0.60$, $F = 18.33$, $p < 0.001$

Nilai R^2 (R-squared) sebesar 0.60 menunjukkan bahwa 60% variasi dalam variabel dependen, yaitu penerapan *Green Budgeting*, dapat dijelaskan oleh dua variabel independen dalam model, yaitu transparansi anggaran dan partisipasi publik. Ini berarti bahwa model regresi memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan pengaruh kedua faktor tersebut terhadap *Green Budgeting*. Meskipun tidak sempurna, nilai 0.60 tergolong moderat hingga kuat dalam penelitian sosial, khususnya yang melibatkan persepsi masyarakat melalui data survei. Selanjutnya, nilai F sebesar 18.33 merupakan hasil dari uji ANOVA (Analysis of Variance) yang digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Nilai ini menunjukkan bahwa model secara simultan signifikan, artinya paling tidak salah satu variabel independen secara statistik berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan nilai signifikansi $p < 0.001$, dapat disimpulkan bahwa model regresi sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 99,9%. Artinya, probabilitas kesalahan dalam menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel independen dan dependen sangat kecil, kurang dari 0,1%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran dan partisipasi publik merupakan faktor penting yang memiliki hubungan yang signifikan dan bermakna terhadap keberhasilan implementasi *Green Budgeting* di tingkat pemerintah pusat.

Pembahasan

Hasil analisis regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa baik transparansi anggaran maupun partisipasi publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *Green Budgeting* oleh pemerintah pusat. Kedua variabel independen ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan variasi penerapan anggaran berbasis lingkungan, dengan nilai R^2 sebesar 0.60. Artinya, lebih dari separuh variasi dalam implementasi *Green Budgeting* dapat dijelaskan oleh transparansi dan partisipasi.

Koefisien regresi menunjukkan bahwa transparansi anggaran memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan partisipasi publik. Hal ini mencerminkan bahwa ketika informasi anggaran, termasuk komponen lingkungan, disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik, maka dukungan dan pengawasan terhadap penerapan *Green Budgeting* menjadi lebih besar. Keterbukaan data dan pelaporan anggaran menciptakan ruang akuntabilitas yang mendorong efisiensi serta orientasi keberlanjutan dalam pengeluaran negara. Temuan ini sejalan dengan teori good governance yang menekankan pentingnya transparansi sebagai salah satu pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks *Green Budgeting*, transparansi tidak hanya memfasilitasi akuntabilitas fiskal, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menghadapi isu perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya. Partisipasi publik juga terbukti berpengaruh signifikan meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran — seperti dalam forum konsultasi publik, survei, dan mekanisme pelibatan warga lainnya — tetap menjadi elemen penting dalam keberhasilan penerapan anggaran hijau. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka cenderung lebih mendukung dan berkontribusi terhadap kebijakan tersebut. Perbedaan tingkat pengaruh ini bisa dijelaskan dari beberapa aspek. Salah satunya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat umum mengenai mekanisme partisipasi dalam proses penyusunan APBN, khususnya yang terkait dengan aspek lingkungan. Selain itu, tidak semua forum partisipatif memberikan umpan balik langsung yang dirasakan oleh peserta, sehingga menurunkan insentif untuk terlibat aktif. Dari sisi kebijakan, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi anggaran sebaiknya menjadi prioritas strategis. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan BPK, perlu memperkuat sistem pelaporan digital yang tidak hanya menyajikan data mentah, tetapi juga menyediakan analisis yang dapat dipahami oleh publik non-teknis. Selain itu, green tagging dalam anggaran perlu diperluas cakupannya agar publik dapat melacak secara langsung alokasi dan realisasi anggaran terkait lingkungan. Untuk memperkuat partisipasi publik, dibutuhkan inovasi kebijakan yang membuat proses partisipatif lebih inklusif dan relevan. Ini bisa dilakukan melalui edukasi publik mengenai pentingnya penganggaran lingkungan, membangun aplikasi interaktif, serta memperbanyak kanal umpan balik daring dan luring yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Penelitian ini juga memberikan pesan bahwa sinergi antara transparansi dan partisipasi publik merupakan kunci utama. Keduanya saling melengkapi:

transparansi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan atau memberi masukan, sementara partisipasi memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar terdengar dan dipertimbangkan dalam proses anggaran. Dengan demikian, peningkatan *Green Budgeting* di tingkat pemerintah pusat membutuhkan pendekatan holistik yang memperkuat dua sisi mata uang tata kelola yang baik: keterbukaan dan keterlibatan. Tanpa keduanya, penganggaran berbasis lingkungan akan sulit berkembang secara optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merancang instrumen dan regulasi yang mendorong peningkatan kualitas anggaran lingkungan. Penguatan transparansi dan pelembagaan partisipasi publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan efektivitas kebijakan fiskal yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan partisipasi publik berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Green Budgeting* di tingkat pemerintah pusat. Transparansi anggaran memiliki pengaruh yang lebih dominan, yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi, terutama yang berkaitan dengan *Green Budgeting* sangat penting dalam mendukung efektivitas kebijakan berbasis keberlanjutan. Partisipasi publik juga memberikan kontribusi positif, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah, menandakan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan fiskal yang berorientasi lingkungan. Sebagai saran, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan BPK disarankan untuk terus meningkatkan transparansi anggaran, terutama dengan memperluas akses publik terhadap data *Green Budgeting* yang akurat dan mudah dipahami. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme partisipatif yang lebih inklusif dan edukatif guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penganggaran. Upaya ini akan memperkuat tata kelola anggaran yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga berpihak pada pembangunan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada para narasumber, baik dari aktivis lingkungan, akademisi, dan mahasiswa ekonomi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga selama proses survei berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi tempat

penulis bernaung atas dukungan moral dan fasilitas yang diberikan dalam penyusunan artikel ini. Tidak lupa, apresiasi disampaikan kepada tim editor dan reviewer jurnal yang telah memberikan masukan dan koreksi konstruktif demi penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alqadrie, S. Y. A. R. (2020). Katarak Anggaran: Interaksi Dan Simbol Kebijakan Demi Kepentingan Rakyat. Wineka Media.
- Angi, E. M., & Wiati, C. B. (2021). Kajian Ekonomi Politik Deforestasi Dan Degradasi Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 3(2), 63–80.
- Dewi, M. S., & Ferayani, M. D. (2022). Motivasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Individu. *Sintesa Prosiding*, 489–496.
- Kabuam, W. (2024). Desentralisasi Dan Otonomi Khusus: Dinamika Sistem Politik Indonesia Di Merauke. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 8282–8299.
- Kardina, M., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 615-620.
- Manohara, B. P., Nurdin, I., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Optimasi Tik Di Sektor Keuangan Dan Ekonomi, Studi Kasus Kabupaten Banyuwangi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 232–239.
- Mauni, C. (2025). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 104–115.
- Nilwan, A., Rizal, S., Indrayenti, I., & Khairudin, K. (2020). Prosiding Penelitian Tema: “Penelitian Serta Pembangunan Masyarakat, Dalam Upaya Meningkatkan Publikasi Internasional, 2017 “.
- Nurmardiansyah, E. (2021). Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. *Veritas Et Justitia*, 1(1).
- Pranowo, K. (2024). Analisis Kualitatif Dampak Kebijakan Unified Budget Terhadap PHLN dari Tinjauan Good Governance: Studi Kasus di Kementerian Pertanian. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 1(1), 64-74.
- Razak, A., Ludigdo, U., Sukoharsono, E. G., & Thoyib, A. (2020). Perilaku Kuasa Eksekutif Dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(3), 369–540.
- Ridwan, G., & Fitriyani, R. (2022). Mendorong Replikasi Dan Pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (Eft) Melalui Skema Tape Dan Take Di Indonesia.

- Saputra, A. (2022). Pengaruh Situasi Audit, Etika, Pengalaman Dan Profesionalisme Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Oleh Akuntan Publik. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sartika, D. (2022). Pengelolaan Banjir Di Kota Samarinda Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sumur Biopori. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 63–76.
- Setiawan, I. (2024). Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. Cv. Rtujuh Media Printing.
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Ketahanan Lingkungan Studi Pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–23.
- Suluh, A. R. B. (2012). Pengaruh Karakteristik Penganggaran Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja Kppn Malang). *Simposium Nasional Akuntansi Vii*, 1–20.
- Waluyo, W. (2021). *Green Budgeting* (Konsep Anggaran Keuangan Daerah Berbasis Isu Lingkungan Hidup Menuju Local Sustainable Development Goals).
- Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia Pada 2010-2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97–119.
- Yudhiantara, I., Hakim, A., Muluk, M. R. K., & Noor, I. (2020). Transformasi E-Government Menuju E-Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Media Centre Pemerintahan Kota Surabaya. Universitas Brawijaya.